

DIGADANG JADI PENGGANTI ANIES

Ahmad Sahroni: Mimpi Saya Jadi Presiden

JAKARTA (IM) - Bursa kandidat calon Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan mulai ramai diperbincangkan. Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni merupakan salah satu nama dalam bursa kandidat cabug DKI. Begini respons Sahroni.

"Terkait isu yang berembus belakangan ini, tentang nama saya yang disebut-sebut sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, saya sih sebenarnya mengalir saja," kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (5/1).

Namun sebetulnya Sahroni tak punya mimpi menjadi Gubernur DKI. Sahroni justru berangan-angan menjadi suksesor Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI.

"Sebenarnya mimpi saya adalah jadi presiden. Namun, kalau kita lihat kondisi realitasnya di lapangan, ya mungkin masih perlu waktu," ucapnya.

Sahroni tak mempersoalkan dukungan kader yang mendorongnya maju sebagai cabug DKI di Pilkada 2024. Tapi, sebut dia, sejauh ini belum ada pembahasan resmi di kalangan internal NasDem perihal cabug DKI.

"Kembali ke Gubernur DKI Jakarta. Saya lihat dorongan yang muncul ini sebagai aspirasi dari kader, dan tentu hal itu sah-sah saja. Yang pasti, sejauh ini, dari komunikasi formal yang ada, pembahasan ini belum pernah muncul," terangnya.

Lebih lanjut Sahroni mengaku saat ini hanya fokus pada dua jabatan yang diemban. "Crazy rich Priok" itu sedang fokus menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR dan Ketua Panitia atau Organizing Committee Formula E.

"Belum ada komunikasi maupun arahan terkait posisi gubernur. Jadi saya mau fokus saja bekerja sebagai anggota DPR dan Ketua Panitia Formula E," sebut Sahroni.

"Jika kemudian ada aktivitas marketing yang saya lakukan selama ini, itu semata untuk menaikkan suara partai," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, bursa kandidat cabug DKI mulanya dilontarkan pimpinan DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Taufik. Ada tiga nama yang disebut Taufik, yakni Wakil Gubernur DKI saat ini Ahmad Riza Patria, mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmy Diani, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

DPP Gerindra menekankan bahwa pernyataan Taufik bukan sikap resmi partai. Namun DPP Gerindra tidak melarang kadernya berbicara soal kandidat cabug DKI.

Sementara itu, dukungan ke Sahroni agar maju di Pilgub DKI datang dari internal NasDem sendiri. Sahroni dinilai layak menjadi suksesor Anies sebagai Gubernur DKI.

"Nah, kenapa kita mantankan? Pertama, figur Sahroni menarik, muda, ngetren, punya duit, komunikasinya baik dengan semua pihak, merakyat, dia dermawan orangnya. Inilah, semua sudah cukup," sebut Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Jawa 1 DPP NasDem, Effendy Choire, Selasa (4/1). Seperti diketahui, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta habis pada Oktober 2022. Setelah Anies tak lagi menjabat, kursi Gubernur DKI akan diduduki oleh penjabat.

● yan

4 Metropolis

IDN/ANTARA



BANJIR ROB DI PELABUHAN KALI ADEM

Warga beraktivitas saat terjadinya banjir rob di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta, Rabu (5/1). Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), adanya fase bulan baru yang bersamaan dengan masa Perigee (jarak terdekat bulan ke bumi) menyebabkan terjadinya peningkatan secara signifikan ketinggian pasang air laut mencapai maksimum.

Ahok Dinilai Kuat untuk Rebut Kursi Gubernur DKI

Nama-nama yang kuat untuk kandidat gubernur DKI Jakarta, masih nama calon lama seperti Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga Agus Harimurti Yudhoyono. Namun suara parpol pengusungnya masih dinamis karena masih tergantung pada hasil Pemilu 2024 yang akan dilakukan beberapa bulan sebelum gelaran Pilkada Serentak 2024.

JAKARTA (IM) - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menilai peta bakal calon potensial untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024 masih sangat cair. Nama-nama

yang kuat masih nama calon lama seperti Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga Agus Harimurti Yudhoyono. Hal itu disampaikan Qo-

dari menanggapi pernyataan Wakil ketua DPRD DKI Jakarta asal Gerindra, M Taufik. Dia mengaku akan mendorong partai segera membahas isu bakal calon tersebut.

Di benaknya, nama potensial adalah seperti Anies Baswedan, Wagub Ahmad Riza Patria, Bahlil Lahadalia, hingga Airin Rachmi Diany.

"Ini menarik ya, karena nama-nama sudah mulai muncul. Tetapi saya kira masih sangat amat dinamis," kata Qodari, Rabu (5/1).

Ada sejumlah hal yang menyebabkan ketidakpastian itu. Yang Pertama, suara parpol pengusungnya masih dinamis karena tergantung pada hasil Pemilu 2024 yang akan dilaku-

kan beberapa bulan sebelum gelaran Pilkada Serentak 2024.

"Kalau di Pilkada Jakarta ini partainya masih belum pasti. Bisa saja misalnya PSI naik lagi, sehingga potensial mengajukan calon. Misalnya bisa juga PKS suaranya naik, itukan juga mempengaruhi calon. Jadi ini masih sangat cair," ujarnya.

Nah, seandainya masuk ke tataran nama bakal calon, Qodari menduga nama-nama dengan elektabilitas tinggi adalah nama lama yang pernah maju di pilkada. Sebut saja Anies Baswedan dan Basuki. Dan ditambah AH Yudhoyono yang pernah bertarung di Pilkada lalu namun keok di awal. Minimal dia sudah dikenal oleh masyarakat di Jakarta.

Nama-nama lain yang baru muncul seperti Bahlil, Airin, Sahroni, dinilai masih belum setinggi tiga nama yang disebutkan tadi.

"Bahkan Riza Patria pun masih dinamis, karena dia

Wagub pengganti dan relatif baru menjabat," imbuhnya.

Untuk nama Tri Rismaharini, Qodari menilainya masih belum muncul sebagai calon yang potensial. Sebab PDI Perjuangan, partainya Risma, memang belum menyebutkan atau mengumumkan namanya untuk maju sebagai calon.

Untuk Airin, Qodari menilainya sebagai sosok yang potensial. Namun sebagai dengan elektabilitas tinggi adalah nama lama yang pernah maju di pilkada. Sebut saja Anies Baswedan dan Basuki. Dan ditambah AH Yudhoyono yang pernah bertarung di Pilkada lalu namun keok di awal. Minimal dia sudah dikenal oleh masyarakat di Jakarta.

"Jadi ini masih sangat cair, belum tahu siapa akan berpasangan maju dan satu variabel lagi adalah melihat dari hasil Pemilu dan Pilpres 2024 yang akan datang, siapa yang akan maju dan jadi calon," tegasnya.

● yan



FOTO/ANT

UMKM KOPI DI JAKARTA

Pekerja mengemas bubuk kopi ke dalam wadah di sebuah usaha pengolahan kopii, Jatinegara, Jakarta, Rabu (5/1). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kopi yang sudah ada sejak tahun 1952 di Jakarta tersebut menjual kopi jenis robusta dan arabika.

Vaksin Booster Mulai 12 Januari, Dinkes DKI Gandeng Faskes Swasta

JAKARTA (IM) - Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan siap berkolaborasi dengan pemilik fasilitas kesehatan swasta untuk proses vaksin booster kepada masyarakat umum. Rencananya pemberian vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster bakal digelar pada 12 Januari 2022.

"Kami juga sangat siap berkolaborasi dengan faskes swasta, kolaborator yang berinisiatif untuk membuka sentra vaksin, itu semua kita bersama-sama untuk memberikan layanan," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia Handayani saat dihubungi, Rabu (5/1).

Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat distribusi vaksin booster. Sebab dalam beberapa kasus, pihak penerima vaksin Covid-19 tidak bisa datang ke sentra vaksinasi dan harus dijemput oleh petugas. Dengan adanya kerja sama pihak swasta, jumlah tenaga medis semakin banyak dan kasus seperti ini dapat tertangani dengan baik.

"Waktu awal 2021 kami semua lintas sektor bisa bersama-sama untuk mempercepat vaksinasi lansia. Sampai diantar-jemput, sampai difasilitasi untuk memudahkan akses, seperti itu juga kira-kira yang akan kami lakukan," kata Dwi.

Rencana vaksin booster ini pertama kali disampaikan

oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Ia mengatakan vaksin booster akan diberikan pada kelompok masyarakat usia dewasa di atas 18 tahun dan sesuai dengan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Ini akan diberikan dengan jangka waktu di atas enam bulan sesudah dosis kedua. Kami identifikasi sudah ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini," ujar Budi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin (3/1).

Pemerintah menetapkan kriteria daerah yang bisa menyuntikkan vaksin booster, yakni kabupaten/kota yang sudah memenuhi 70 persen suntikan pertama dan 60 persen dosis kedua. "Sampai sekarang ada 244 kabupaten/kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut," ujar Budi.

Tenaga kesehatan saat diperiksa kesehatannya sebelum disuntikkan vaksin dosis ketiga atau booster di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Matraman, Jakarta, Jumat, 6 Agustus 2021. Pemberian vaksin dosis ketiga atau booster kepada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, hingga saat ini masih terus dilaksanakan. Pemberian vaksin dosis ketiga atau booster ditargetkan rampung pada pekan kedua Agustus 2021 lalu. ● yan

KASUS OMICRON DI JAKARTA NAIK

Legislator: PTM 100 Persen Sebaiknya Ditunda

JAKARTA (IM) - Kasus aktif Omicron di DKI Jakarta meningkat secara signifikan. Berdasarkan instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2022 tentang PPKM Level 3, 2, 1, DKI Jakarta kembali dinyatakan berstatus level 2.

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, mengimbau agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meninjau ulang pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen.

"Terkait peningkatan level 2, kenaikan cukup signifikan omicron di Jakarta, saya kira perlu dipertimbangkan pelaksanaan PTM 100 persen ini, saya kira lebih baik untuk sementara ditunda," kata Rahmad, Rabu (5/1).

Namun demikian, apabila PTM tetap harus dilakukan, ia mendorong agar seluruh siswa telah divaksinasi. Harus dipastikan dalam 1-2 pekan ini vaksinasi anak perlu dipercepat.

"Sehingga ketika sudah divaksinasi kesiapan psikologis, kesiapan daya tahan tubuh semakin tambah kuat menghadapi segala gempuran dari varian-varian omikron maupun varian lain," ujarnya.

Politikus PDIP itu juga menyarankan agar dilakukan

random test dengan menggunakan PCR terhadap para siswa. Hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Omicron yang berasal dari orang tanpa gejala (OTG). "Sampling test ini sebagai upaya ketika adanya OTG kemudian menyebar itu segera bisa terdeteksi dan bisa diambil langkah-langkah antisipasi terhadap strategi apakah dihentikan sementara, atau bagaimana saya kira jangan sampai kita kecolongan," tegasnya.

Dirinya juga mengimbau agar para siswa dan guru untuk tetap ketat menerapkan protokol kesehatan tanpa terkecuali. Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IX, Netty Prasetyani. Netty meminta aturan penyelenggaraan PTM di semester genap tahun ajaran 2021/2022 dievaluasi. Salah satu yang ia soroti ialah hilangnya hak orang tua untuk tetap memilih opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

"Orang tua peserta didik harusnya memiliki hak penuh untuk memastikan pendidikan bagi anaknya dan sekaligus melindungi sang anak dari paparan Covid-19. Pemerintah tidak boleh menghilangkan opsi untuk memilih PJJ tersebut karena yang menanggung

dampak terbesarnya andaikan terpapar Covid-19 adalah si peserta didik dan keluarganya, bukan pemerintah," kata Netty dalam keterangannya.

Terlebih lagi, Netty menambahkan, saat ini juga ada ancaman varian Omicron di mana penyebarannya jauh lebih cepat dibandingkan varian lainnya. "DKI Jakarta saja per hari ini statusnya sudah naik lagi ke PPKM Level 2. Jadi rasanya aneh kalau orang tua dipaksa melakukan PTM, padahal alasan untuk melakukan PJJ demi ke hati-hatian itu juga sangat kuat" kata politikus PKS itu.

Karena itu menurutnya kekhawatiran orang tua akan keselamatan anaknya harus diakomodir pemerintah. Pemerintah diharapkan tidak memaksakan harus PTM, namun tetap sediakan fasilitas untuk proses PJJ.

"Apalagi berdasarkan temuan dari KPPI penerapan proses di sekolah-sekolah masih sangat lemah karena minimnya pengawasan. Di sisi lain banyak sekolah yang fasilitas prosesnya tidak memadai. Jadi wajar apabila ada orang tua yang khawatir melepas anaknya untuk mengikuti PTM" imbuhnya. ● yan

Pemkot Bekasi Raker Bersama Terkait Pengendalian Banjir Kali Rawalumbu

FOTO: HUMAS PEMKOT BEKASI



Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (tengah, menghadap kamera) saat Rapat Kerja Bersama terkait pengendalian banjir kali Rawalumbu di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Selasa (4/1).

melakukan survey dengan menyusuri kali Rawalumbu sampai Kalimati. Menurut tim BBWSCC memang diperlukan normalisasi kali, dan kapasitas ruang laju air disesuaikan dengan debit air yang ada,

sehingga kali dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Tri Adhianto menyampaikan, Pemerintah Kota Bekasi sudah menurunkan alat berat untuk melakukan pengerukan lumpur di Kali

Rawalumbu, sudah terhitung 2 bulan berjalan dan terus berproses.

Tri juga menyampaikan, Pemerintah Kota Bekasi sudah berkoordinasi dengan pihak Betos untuk membuat folder

air sebagai alternatif upaya meminimalisir banjir di wilayah Rawalumbu, Sepanjang Jaya dan Pengasinan.

"Kami sudah menurunkan alat berat kurang lebih dua bulan untuk melakukan pengerukan lumpur yang menyebabkan pendangkalan air kali Rawalumbu, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Betos untuk membuat folder air, sebagai upaya meminimalisir banjir di tiga wilayah tersebut," jelas Tri dalam rilis Humas Pemkot Bekasi, Rabu (5/1).

Selain itu, Tri juga menyampaikan pihaknya sudah menjembatani permasalahan tersebut kepada kementerian terkait, agar Pemerintah Pusat dapat turut andil dalam mengatasi permasalahan tersebut.

"Jadi saya juga sudah menyampaikan ke kementerian terkait agar permasalahan banjir di Kota Bekasi dapat diselesaikan secara optimal," kata Tri Adhianto mengakhiri. ● mdl